

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance tahun 2004, pengertian bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan perbankan perlu membangun kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan tersebut dapat dibangun dengan cara melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan sebenarnya. Laporan keuangan dijadikan dasar oleh Bank Indonesia dalam menentukan status suatu bank, apakah bank tersebut dalam keadaan sehat atau tidak (Karuniasih, 2013).

Selain untuk membangun kepercayaan dari masyarakat, perusahaan perbankan juga membuat laporan keuangan untuk keperluan pihak internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan merupakan laporan yang mencerminkan kondisi dari sebuah perusahaan, maka laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting (Nugraheni dkk, 2015).

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan media yang perlu untuk dipertanggungjawabkan dari manajemen. Akan tetapi penggunaan laporan keuangan ini masih sering disalahgunakan oleh penggunanya. Kasus mengenai manipulasi laporan keuangan pernah terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi pada tahun 2012. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengendus adanya penyelewengan dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen grup Bakrie di PT Bumi Resources Tbk 2 (BUMI). PT Bumi tersebut diduga memanipulasi

laporan keuangan setelah sebelumnya mengalami kerugian Rp3,14 triliun sepanjang semester I-2012 (Rifky, 2012).

Laporan keuangan yang diberikan kepada pemilik belum dapat menjamin bahwa informasi yang ada dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, hal ini disebabkan adanya keinginan manajemen untuk dapat memenuhi kepentingan mereka sendiri (Tiswiyanti dkk, 2012). Manajer merupakan pihak yang memiliki banyak informasi lebih dibandingkan dengan pemilik perusahaan, hal tersebut dapat terjadi karena manajer merupakan pihak yang menjalankan perusahaan. Oleh karena, itu perusahaan bisa dijalankan sesuai dengan manajemen itu sendiri. Perbedaan informasi tersebut dapat menyebabkan ketidak seimbangan informasi atau sering disebut juga dengan asimetri informasi.

Menurut Kusumaningtyas (2012), asimetri informasi dapat timbul karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara pemilik dan manajer. Asimetri informasi yang terjadi di dalam perusahaan menyebabkan terjadinya konflik keagenan sehingga perusahaan memerlukan pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan (Marpaung dan Latrini, 2014).

Investor merupakan pihak yang lebih memperhatikan laba sebagai parameter kinerja dari sebuah perusahaan, hal tersebut akan mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dalam menunjukkan informasi laba yang disebut dengan manajemen laba (Agustia, 2013). Praktik manajemen laba pada sebuah perusahaan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebuah perusahaan. Masyarakat akan menilai bahwa perusahaan merupakan tempat dimana para pelaku kolusi, korupsi, dan berbagai

penyelewengan lain yang dapat merugikan publik. Manajemen laba merupakan fenomena yang sukar dihindari, karena merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan (Karuniasih, 2013).

Salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus manajemen laba adalah karena lemahnya penerapan praktik *corporate governance* (SY dan Hidayati, 2012). Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2004), Penerapan *good corporate governance* diharapkan mampu membangun kepercayaan dari masyarakat dan meminimalisir terjadinya praktik manajemen laba. Hal yang paling utama dari *good corporate governance* adalah bagaimana cara manajer menyajikan informasi mengenai laba kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan keputusan investasi pada suatu perusahaan. Selain itu penerapan *good corporate governance* diperlukan untuk mengendalikan perilaku manajer supaya bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri. Untuk menjalankan *good corporate governance* di dalam perusahaan maka diperlukan dewan komisaris yang mengawasi melalui komite-komite.

Komite audit merupakan salah satu komponen dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan. Komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris yang membantu dewan komisaris melaksanakan tugas pengawasan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan (Nugraheni dkk, 2015). Peran penting komite audit adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut

semua hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Kusumaningtyas, 2012). Keberadaan komite audit dalam sebuah perusahaan maka dapat meningkatkan fungsi monitoring yang dilakukan oleh manajemen, karena dengan semakin ketatnya monitoring maka akan membuat manajemen kehilangan kesempatan untuk melaksanakan tindakan curang (Nabila dan Daljono, 2013).

Salah satu cara untuk melakukan monitoring di dalam perusahaan adalah dengan mengadakan rapat anggota komite audit. Komite audit yang lebih banyak melakukan pertemuan maka akan meminimalisir manajemen memanipulasi laba (Prastiti dan Meiranto, 2013). Komite audit memerlukan independensi dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Selain untuk mengawasi, keberadaan komite audit yang independen maka akan memastikan bahwa laporan keuangan yang ada merupakan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Salah satu dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan (BAPEPAM, 2004). Anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan akan lebih mudah dalam mendeteksi adanya manipulasi laba yang dapat menguntungkan manajemen (Kusumaningtyas, 2013). Oleh karena itu diperlukan anggota komite audit yang memiliki keahlian pada bidang tersebut. Dengan banyaknya keberadaan komite audit atau ukuran komite audit yang semakin besar didalam perusahaan akan dapat meningkatkan fungsi pengawasan komite audit terhadap manajemen, sehingga pemilik perusahaan merasa bahwa kualitas pelaporan oleh manajemen terjamin (Kusumaningtyas, 2014).

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai komite dan mendapat hasil yang berbeda. Penelitian Kusumaningtyas (2012) menguji mengenai pengaruh independensi komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba dengan proksi *discretionary accrual*, sehingga independensi komite audit merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh para komite audit. Penelitian ini juga menunjukkan hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, dengan proksi *discretionary accrual* untuk manajemen laba.

Bonita dan Raharja (2014) meneliti mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap praktik manajemen laba. Pada penelitian ini *corporate governance* yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pengaruh kualitas audit, dan pengaruh frekuensi pertemuan komite audit. Penelitian ini memberikan hasil kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan frekuensi rapat berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian ini akan menguji mengenai pengaruh komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini mengacu dari penelitian Prabowo (2014) yang meneliti mengenai pengaruh komisaris independen, independensi komite audit, ukuran dan jumlah pertemuan komite audit terhadap manajemen laba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : (1) Sampel penelitian sebelumnya menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur pada periode 2010-2012, sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan pada bank konvensional periode 2015-2017. (2) Penelitian ini tidak menggunakan semua variabel yang digunakan pada

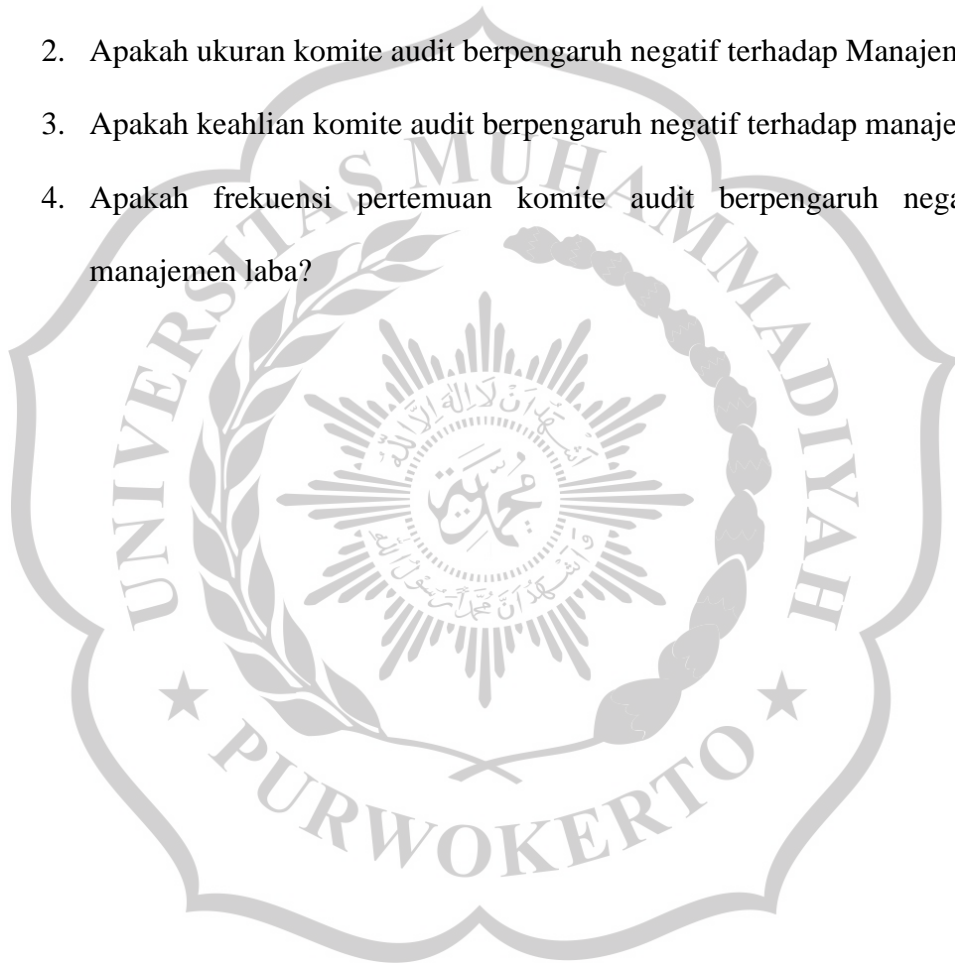
penelitian sebelumnya yaitu komisaris independen, penelitian mengenai komisaris independen telah banyak dilakukan, pada penelitian sebelumnya memberikan keterkaitan komisaris independen dengan manajemen laba, bahwa komposisi dewan komisaris memberikan pengaruh yang sangat lemah, sehingga mengindikasikan bahwa komponen dewan komisaris menjadi mekanisme yang memberikann kontribusi yang kurang efektif (Prabowo, 2014), dan adanya penambahan variabel yaitu pengaruh keahlian komite audit. Penelitian ini berfokus terhadap independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap praktik manajemen laba dengan periode penelitian 2015-2017 pada bank konvensional di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang berkualitas dan dapat di pertanggung jawabkan. Sehingga laporan kauangan yang disajikan bebas dari manajemen laba. Oleh karena itu, akuntan publik diharuskan untuk memperhatikan kualitas laporan keuangan yang disajikan agar dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan dan dapat mengurangi terjadinya manajemen laba. Selain itu, penelitian mengenai peran komite audit terhadap besarnya praktik manajemen laba masih sedikit, sehingga peneliti tertarik meneliti peran komite audit dalam praktik manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu hasil penelitian masih belum konsisten juga menjadi alasan penulis untuk menguji “Pengaruh Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Keahlian Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen Laba”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba?
3. Apakah keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba?
4. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba?



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendaknya dicapai adalah:

- a. Untuk menemukan bukti empiris independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
- b. Untuk menemukan bukti empiris ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
- c. Untuk menemukan bukti empiris keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
- d. Untuk menemukan bukti empiris frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi Perbankan

Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk mengurangi terjadinya praktek manajemen laba pada perusahaan perbankan, dan mampu meningkatkan pentingnya *good corporate governance* dalam aktivitasnya.

b. Bagi Investor

Memberikan gambaran mengenai praktik manajemen laba yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambahkan wawasan mengenai komite audit dan manajemen laba. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lebih lanjut.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, terutama mengenai independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap manajemen laba pada bank konvensional yang terdaftar di BEI.

